



## PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JONAS BATLAYERI, S.Sos.
2. Tempat Lahir : Meyano.
3. Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 23 Juli 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 006 RW 002 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020) / Staff Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



6. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1) ANTHONI HATANE,SH.M.H, 2) RUBY LOPULALAN,SH., 3) KORNELIS SERIN,S.H.M.H, 4) MUSLIM ABUBAKAR S.H., 5) YANI TUHURIMA,SH.,6) MATHEOS KAINAMA S.H dan 7) YUNUS PETRASON LATUE, SH., Ke- 7 adalah Advokat/dan Konsultan Hukum pada Law Firm HATANE &,Associates beralamat di Listrik Negara Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 108/LF.HAT/TIPIKOR/SKK/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 1051/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan

Halaman 2 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan** yaitu secara melawan hukum, telah :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA.

Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 4 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



TA 2020 untuk melengkapi semua SPJ kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 141 :  
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :  
angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*  
angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) atau*

Halaman 5 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuanga Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
	Jumlah	6.179.030.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Halaman 7 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	67.989.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
	tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.895.350.000</b>

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- Kepala
- Sekretariat, membawahkan :
  - Subbagian Perencanaan
  - Subbagian Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Anggaran, membawahkan :
  - Subbidang Pendapatan
  - Subbidang Belanja
  - Subbidang Pembiayaan
- Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - Subbidang Belanja Langsung
  - Subbidang Belanja Tidak Langsung
  - Subbidang Kas Daerah
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
  - Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
  - Subbidang Pelaporan



- f. Bidang Aset, membawahkan :
    1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
    2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019
  - Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE**,
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Sdr. FRANCISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**

Halaman 10 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG, SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik	97.639.000	97.084.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan		
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan	47.974.000	47.974.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jaringan		
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
	Jumlah	6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi	143.699.000	143.699.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Rancangan DPA-SKPD		
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
	Jumlah	2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :



## 1. Sekretariat

### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

### b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi	414.598.000	414.598.000	140



	dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	00	000	Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.0 00	295.838. 000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691. 000	2.054.691. 000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23



				Kegiatan
--	--	--	--	----------

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

3. Bidang Anggaran :



a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan



	tentang Penjabaran Perubahan APBD			
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah
----	---------------	----------	-----------	--------



				Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan	101.959.000	101.004.000	30



	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

#### 5. Bidang Aset :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan



4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>166.673.000</b>	<b>154.900.000</b>	<b>13 Kegiatan</b>

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>870.364.000</b>	<b>859.128.500</b>	<b>309</b>



				Kegiatan
--	--	--	--	----------

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.
- Bahwa berdasarkan pada realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri



dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 224 nomor tiket yang dilampirkan datanya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :



No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Keterangan
1.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147 645406	07 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
2.	Leasa/Syar on Mrs	9902147 645406	07 Jan 2020	Saum laki	Ambo n		
3.	Maria/Gore tty Batlayeri Mrs (ADT)	1262118 439240	07 Jan 2020	Ambo n	Denp asar	Rp2.164.8 00,00	GARU DA
4.	Maria/Gore tty Batlayeri Mrs (ADT)	1622118 466264	08 Jan 2020	Denp asar	Ambo n	Rp2.214.8 00,00	
5.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147 957966	09 Jan 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
6.	Lirrey/Jaco mina Mrs	9902149 728167	24 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
7.	Malirmasell e/Liberata Mrs	9902149 728168	24 Jan 2020	Saum laki	Ambo n		
8.	Malirmasell e/Liberata Mrs	9902150 030863	27 Jan 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	
9.	Lirrey/Jaco mina Mrs	9902150 030864	27 Jan 2020	Ambo n	Saum laki		
10	Batlayeri/J onas Mr	9902149 727283	24 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	

Halaman 26 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



11	Bwariat/Fransisco P Mr	9902149 821925	25 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
12	Batlayeri/Jonas Mr	9902150 038242	27 Jan 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	
13	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150 038243	27 Jan 2020	Ambo n	Saum laki		
14	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150 356076	29 Jan 2020	Saum laki	Jakar ta	Rp6.344.4 00,00	
15	Apriliano/Yohanes Mr	9902150 356077	29 Jan 2020	Saum laki	Jakar ta		
16	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150 611261	31 Jan 2020	Jakar ta (Hali m)	Saum laki	Rp7.826.6 00,00	
17	Apriliano/Yohanes Mr	9902150 611262	31 Jan 2020	Jakar ta (Hali m)	Saum laki		
18	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150 443358	30 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
19	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150 443064	30 Jan 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
20	Batlayeri/Jonas Mr	9902151 052023	04 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
21	Batlayeri/Jonas Mr	9902151 368188	07 Feb 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
22	Jemporma	9902151	11	Saum	Ambo	Rp1.657.4	

Halaman 27 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



	se/Primus Ronald Mr	804866	Feb 2020	laki	n	00,00	
23	Jemporma se/Primus Ronald Mr	9902152 003539	12 Feb 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
24	Lirrey/Jaco mina Mrs	9902153 231524	24 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
25	Ranolat/Ha ns Mr	9902153 231525	24 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	00,00	
26	Lirrey/Jaco mina Mrs	9902153 232165	24 Feb 2020	Ambo n	Jakar ta (Hali m)	Rp4.921.4 00,00	
27	Ranolat/Ha ns Mr	9902153 232166	24 Feb 2020	Ambo n	Jakar ta (Hali m)	00,00	
28	Lirrey/Jaco mina Mrs	9902153 401679	25 Feb 2020	Jakar ta (Hali m)	Saum laki	Rp8.196.2 00,00	
29	Ranolat/Ha ns Mr	9902153 401679	25 Feb 2020	Jakar ta (Hali m)	Saum laki	00,00	
30	Titirloloby/ Paulus Mr	9902152 998197	21 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
31	Afis/Kurnia Mr	9902152 998198	21 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	00,00	
32	Titirloloby/ Paulus Mr	9902153 204657	23 Feb 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	



33	Afis/Kurnia Mr	9902153 204658	23 Feb 2020	Ambo n	Saum laki		
34	Batlayeri/J onas Mr	9902153 227882	24 Feb 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
35	Batlayeri/J onas Mr	9902153 515076	26 Feb 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
36	Malirmasel e/Liberata Mrs	9902154 092515	02 Mar 2020	Jakar ta (Hali m)	Saum laki	Rp3.913.3 00,00	
37	Batlayery/ Maria Goretty Mrs	9902154 790855	09 Mar 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
38	Batlayery/ Maria Goretty Mrs	9902154 984910	10 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
39	Takndare/ Klementina Mrs	9902154 984910	10 Mar 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
40	Takndare/ Klementina Mrs	9902155 438984	13 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.4 00,00	
41	Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs	9902155 207757	12 Mar 2020	Saum laki	Ambo n	Rp6.629.6 00,00	
42	Fasak/Ever ista Mrs	9902155 207758	12 Mar 2020	Saum laki	Ambo n		
43	Jakobus/Ja kobus Mr	9902155 207759	12 Mar 2020	Saum laki	Ambo n		



44	Kenjapluan /Stanislaus Mr	9902155 207760	12 Mar 2020	Saum laki	Ambo n		
45	Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs	9902156 034495	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
46	Fasak/Ever ista Mrs	9902156 034496	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp6.749.6 00,00	
47	Jakobus/Ja kobus Mr	9902156 034497	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
48	Kenjapluan /Stanislaus Mr	9902156 034498	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
49	Fubumase/ Marsiana Mrs	9902156 035184	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
50	Leunufna/It a Maria Mrs	9902156 035185	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp5.062.2 00,00	
51	Sabono/Ge ri Simon Mr	9902156 035186	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
52	Jamlean/Al owysius Mr	9902156 035196	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	
53	Selitubun/P etrus P Mr	9902156 035197	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		
54	Malirmasel e/Liberata Mrs	9902156 035089	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	
55	Simanjunta k/al Magdalena	9902156 035090	20 Mar 2020	Ambo n	Saum laki		



56	Oratmangu n/Klementi na Y Mrs	9902149 726799	24 Jan 2020	Saum laki	Ambo n	Rp2.157.4 00,00	
57	Samangun/ Benyamin Mr	9902156 792375	08 Apr 2020	Ambo n	Saum laki	Rp8.418.5 00,00	
58	Oratmangu n/Klementi na Y Mrs	9902156 792376	08 Apr 2020	Ambo n	Saum laki		
59	Batlayeri/M agdalena Mrs	9902156 792377	08 Apr 2020	Ambo n	Saum laki		
60	Sakan/Novi ta Miss	9902156 792378	08 Apr 2020	Ambo n	Saum laki		
61	Samangun/ Thomas Mstr	9902156 792379	08 Apr 2020	Ambo n	Saum laki		
62	Sabono/Ge ry Simon Mr	9902160 105245	01 Sep 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
63	Jamlean/AI owysius Mr	9902160 105246	01 Sep 2020	Saum laki	Ambo n		
64	Jamlean/AI owysius Mr	9902160 153162	02 Sep 2020	Ambo n	Saum laki	Rp3.374.8 00,00	
65	Sabono/Ge ri Simon Mr	9902160 153163	02 Sep 2020	Ambo n	Saum laki		
66	Bwariat/Fra nsisco P Mr	9902155 168539	11 Mar 2020	Ujung Pand ang	Saum laki	Rp2.410.3 00,00	
67	Malirmasel e/Liberata Mrs	9902162 081039	20 Oct 2020	Saum laki	Ambo n	Rp4.972.2 00,00	



68	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saum laki	Ambo n		
69	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saum laki	Ambo n		
70	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.400,00	
71	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.400,00	
72	Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saum laki	Ambo n		
73	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saum laki	Ambo n	Rp4.972.200,00	
74	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saum laki	Ambo n		
75	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.400,00	
76	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.400,00	
77	Melmambe ssy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
78	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki	Rp8.437.000,00	
79	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		



80	Maranresy/ Viktorianus Mr	9902163 184388	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
81	Jemporma se/Primus Ronald Mr	9902163 184389	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
82	Lamere/Ag nes Mrs	9902165 154082	11 Dec 2020	Saum laki	Jakar ta	Rp16.680. 500,00	
83	Titirloloby/ Paulus Mr	9902165 154083	11 Dec 2020	Saum laki	Jakar ta		
84	Larwuy/Sh anto Mr	9902165 154084	11 Dec 2020	Saum laki	Jakar ta		
85	Ulmasemb un/Pius Mr	9902165 154085	11 Dec 2020	Saum laki	Jakar ta		
86	Touwely/AI byan Hart Mr	9902165 154086	11 Dec 2020	Saum laki	Jakar ta		
87	Lamere/Ag nes Mrs	9902165 383246	15 Dec 2020	Jakar ta	Saum laki		Rp20.752. 000,00
88	Titirloloby/ Paulus Mr	9902165 383247	15 Dec 2020	Jakar ta	Saum laki		
89	Ulmasemb un/ Mr	9902165 383248	15 Dec 2020	Jakar ta	Saum laki		
90	Larwuy/Sh anto Mr	9902165 383249	15 Dec 2020	Jakar ta	Saum laki		
91	Touwely/AI byan Hart Mr	9902165 383250	15 Dec 2020	Jakar ta	Saum laki		



92	Lololuan/Imanuel Mr	9902166 121796	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	
93	Boinsera/Petrus B Mr	9902166 095533	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp6.629.6 00,00	
94	Ngilamele/Welem Mr	9902166 095534	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
95	Kuway/Cor da Natalia Mrs	9902166 095535	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
96	Lartutul/Yo hana Mrs	9902166 095536	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
97	Lamere/Za karias Mr	9902166 095546	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp6.629.6 00,00	
98	Malaka/Vic ktor Mr	9902166 095547	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
99	Jemporma se/Ronald J Mr	9902166 095548	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Titirloby/ Marthin M R Mr	9902166 095549	28 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Maranresy/ Viktorianus Mr	9902166 143019	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp3.314.8 00,00	
10	Touwely/Ai byan Hart Mr	9902166 143020	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Taborat/Jo seph Isodorus	9902166 142674	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp1.657.4 00,00	



	Mr						
10	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166 142137	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n	Rp8.287.000,00	
10	Sumanik/A nita Theresia Mrs	9902166 142138	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Apriliano/Yohanis Mr	9902166 142139	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Sermatang /Kristina Mrs	9902166 142140	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Melmambe ssy/Imanuelia Mr Mrs	9902166 142141	29 Dec 2020	Saum laki	Ambo n		
10	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166 287123	01 Jan 2021	Ambo n	Saum laki	Rp5.062.200,00	
11	Melmambe ssy/Imanuelia Mr Mrs	9902166 287124	01 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Jempormase/Maria Cicilia Miss	9902166 287125	01 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Titirloloby/Marthin MR Mr	9902166 444041	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki	Rp6.749.600,00	
11	Apriliano/Yohanis Mr	9902166 444042	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Ngilamele/Welem Mr	9902166 444043	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Boinsera/P	9902166	04	Ambo	Saum		



	etrus B Mr	444044	Jan 2021	n	laki		
11	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166 445067	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki	Rp8.437.000,00	
11	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166 445068	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Jempormase/Ronald J Mr	9902166 445069	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
11	Sermatang /Kristina Mrs	9902166 445070	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
12	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166 445071	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki		
12	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166 446210	04 Jan 2021	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.400,00	
12	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166 452862	05 Jan 2021	Ambo n	Saum laki	Rp1.687.400,00	
<b>Jumlah</b>						<b>Rp243.175.800,00</b>	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi



- Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
    - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
    - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
      1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian).
      2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar).
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63



(enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  - Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :



- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
  - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
  - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa



dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawabwan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabwan dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**



- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
    1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
    2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
    3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
  - Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).**



- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagian besar anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut telah digunakan diluar peruntukan yaitu untuk memenuhi beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas yaitu :

**1. Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian

Halaman 42 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran.

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa.

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020** di bulan November 2020, terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)* dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia



Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali "jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan di kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa selaku kepala Badan menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan kemudian dilakukan pembayaran THR Natal dan Tahun baru kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
  - **Sekretariat, antara lain :**  
Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk

Halaman 44 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

- **Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

- **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria



Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- **Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

- **Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000,00

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPJ atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan



(fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 4  
ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 141 :  
ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :  
angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan

*Halaman 47 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

- angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa selain hal tersebut diatas, ada beberapa kebijakan dari Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, yang langsung menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan-keperluan diluar dari peruntukan atau tidak terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, antara lain digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit, selain itu juga untuk makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin yang besaran nilainya tidak dapat ditentukan lagi jumlahnya.
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
    - Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 48 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta *memperkaya orang lain* dalam hal ini :

1. Saksi Maria Gorelty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
    - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
  2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
    - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
  3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
  4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
  5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset.
- serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi



MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan			- Tidak ada	12	208.686.20
	Rapat-rapat koordinasi	397.17 0.000	397.17 0.000	SPJ - Tidak dilaksanakan		0,00
				- Kelebihan	8	11.818.902



	dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan)			Pembayaran Tiket - Tidak sesuai peruntukan - Tidak pernah dilaksanakan	1 5	24.530.000 56.348.200,00
				<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>301.383.302,00</b>
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>42.438.000,00</b>
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan Pembayaran Tiket	1 1	22.974.000,00 3.379.500,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>26.353.500,00</b>
	<b>Total</b>	<b>481.074.000</b>	<b>480.748.000</b>		<b>30 Kegiatan</b>	<b>370.174.802,00</b>

Rincian Jumlah Nilai  
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan : 12 208.686.200,00



Tidak pernah dilaksanakan	:	8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	:	1	24.530.000
Kelebihan pembayaran	:	9	15.198.402
Double pembayaran	:	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan)	758.071.000	758.071.000	-Tidak pernah dilaksanakan	158	536.615.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	25	99.524.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	10.718.000,00
				<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>646.857.000,00</b>
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan)	275.289.000	275.289.000	-Tidak pernah dilaksanakan	67	208.889.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	12	34.889.000,00
				-jumlah hari perjalanan	3	2.290.000,00



				n tidak sesuai waktu		
					82	246.068.000,00
				<b>Total</b>	<b>g</b>	<b>000,00</b>
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan)	47.974.000	47.974.000	-Tidak pernah dilaksanakan	22	25.724.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	2.425.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	12	5.824.000,00
				<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33.973.000,00</b>
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan)	262.921.000	262.921.000	-Tidak pernah dilaksanakan	36	121.062.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	7	23.151.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai	2	1.372.000,00
				<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>121.062.000,00</b>



				waktu		
					45	
				<b>Total</b>	<b>Ke</b>	<b>145.585.</b>
					<b>g</b>	<b>000,00</b>
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerinta h Daerah  (122 Kegiatan)	414.59 8.000	414.59 8.000	-Tidak pernah dilaksanakan	94	278.295.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	26.722.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00
				<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>324.395.000,00</b>
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD  (93 Kegiatan)	295.83 8.000	295.83 8.000	-Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
				<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>295.830.000,00</b>



				<b>Total</b>	93 Ke g	255.916. 000,00
	<b>Total</b>	2.054. 691.00 0	2.054. 691.00 0		57 1 Ke g	1.652.79 4.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :
  - a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	2	19.604.800,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.081.800,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>40.686.600,00</b>
2	Rekonsiliasi Data	116.558.000	111.260.400	- Tidak pernah	2	28.569.000,00



	Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik  (6 Kegiatan)			dilaksanakan - Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian) - Kelebihan pembayaran tiket	1  3	20.177.000  8.949.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>57.695.000,00</b>
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen  (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8.800.000,00</b>
4	Penataan Administrasi Gaji  (6 Kegiatan)	85.769.000	81.839.000	- Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	5  1	62.049.000,00  3.803.500,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>65.852.500,00</b>
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD  (4 Kegiatan)	38.895.000	36.495.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>490.45</b>	<b>289.54</b>		<b>21</b>	<b>209.529</b>



		4.000	8.100		Ke	.100,00
					g	

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

N	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	-Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	3.360.000,00
				<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>66.840.000,00</b>
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-



	(34 Kegiatan)			an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00
				<b>Total</b>	<b>34 Ke g</b>	<b>30.791.000,00</b>
3	Penataan Administrasi Gaji  (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	37 29 10	104.085.000,00 98.124.000,00 12.600.000,00
				<b>Total</b>	<b>76 Ke g</b>	<b>214.809.000,00</b>
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD  (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak	55 - 13	168.067.000,00 - 18.799.000,00



				sesuai waktu		
					68	
				<b>Total</b>	<b>Ke</b>	<b>186.866.000,00</b>
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi  (34 Kegiatan)	96.113.000	95.410.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	65.573.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	9.963.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	5.223.000,00
				<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>80.759.000,00</b>
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaan)  (86 Kegiatan)	294.777.000	294.514.000	-Tidak pernah dilaksanakan	40	127.296.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	39	128.648.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	7	8.335.000,00
				<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>264.279.000,00</b>



					g	
					32	
					6	
	Total	955.58	952.928		Ke	844.344.
		3.000	.000		g	000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

### 3. Bidang Anggaran :

#### a. Perjalanan dinas luar daerah

N	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (6 Kegiatan)	116.722.000	115.479.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	34.460.000,00
				- Kelebihan pembaya	1	7.581.400,00



				ran tiket		
				Total	6	99.160.40 0,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169 .000	125.039 .000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan	1 8	10.245.00 0,00 104.549.0 00,00
	(9 Kegiatan)			Total	9	114.794.0 00,00
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699 .000	143.699 .000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	3 1 3	67.469.00 0,00 20.730.00 0,00 10.478.50 0,00
	(7 Kegiatan)			Total	7	98.677.50 0,00
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan	40.340. 000	40.340. 000	- Tidak pernah dilaksanakan	3	30.095.00 0,00



	n DPAL-SKPD (4 Kegiatan)			- Kelebiahan pembayaran tiket	1	272.300,00
				Total	4	30.367.300,00
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (10 Kegiatan)	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	3	65.322.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	7	91.020.000,00
				Total	10	156.342.000,00
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota (16 Kegiatan)	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	5	85.259.000,00
				- Kelebiahan pembayaran tiket	1	5.387.400,00
				Total	16	90.646.400,00
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	1	7.169.000,00
				- Tidak	1	8.470.000,00



	Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			pernah dilaksanakan		00
				- Kelebihan pembayaran tiket	5	5.043.000,00
	(7 Kegiatan)			Total	7	20.682,00
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	43.704,00
	(2 Kegiatan)			Total	2	43.704,00
	Total	930.662.000	903.370.000		61	654.373,600,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 21	28.762.600,00
Double pembayaran	: -	-



b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD  (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	-Tidak pernah dilaksanakan	103	365.252.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	1.737.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	15.707.000,00
				<b>Total</b>	<b>115 Ke</b>	<b>382.696.000,00</b>
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD  (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	-Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				<b>Total</b>	<b>35 Ke</b>	<b>98.332.000,00</b>
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah  (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	-Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
				<b>Total</b>	<b>79 Ke</b>	<b>267.466.000,00</b>



4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10	393.368.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
				<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>413.709.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.457.244.000</b>	<b>1.455.970.000</b>		<b>348</b>	<b>1.162.203.000,00</b>	

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)

#### 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN	
1	Penyusunan Laporan	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	
				5	52.195.000,00



	Keuanga Pemd (11 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>55.139.000,00</b>
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	13	147.518.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
				<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>169.123.000,00</b>
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>18.430.000,00</b>
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>40.820.000,00</b>
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.127.400,00
				<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>127.661.400,00</b>
	<b>Total</b>	<b>826.487.000</b>	<b>667.491.000</b>		<b>42 Keg</b>	<b>411.173.400,00</b>



Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 10	4.461.400,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	-Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000,00
				<b>Total</b>	<b>38 Ke g</b>	<b>120.339.000,00</b>
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 Kegiatan)	114.731.000	114.721.000	-Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
				<b>Total</b>	<b>17 Ke g</b>	<b>57.397.000,00</b>
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng	101.959.000	101.004.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	82.101.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	987.000,00



	garaan Akuntansi Pemerinta h Daerah  (25 Kegiatan)				<b>25</b> <b>Ke</b> <b>g</b>	<b>83.088.0</b> <b>00,00</b>
				<b>Total</b>		
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah  (47 Kegiatan)	184.395 .000	183.89 7.000	-Tidak pernah dilaksanakan	42	127.665. 000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	4.638.00 0,00
				<b>Total</b>	<b>47</b> <b>Ke</b> <b>g</b>	<b>132.303.</b> <b>000,00</b>
5	Rekonsilia si dan Verifikasi Laporan Keuangan  (75 Kegiatan)	299.929 .000	298.21 5.000	-Tidak pernah dilaksanakan	70	231.719. 000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	6.321.00 0,00
				<b>Total</b>	<b>75</b> <b>Ke</b> <b>g</b>	<b>238.040.</b> <b>000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>841.148</b> <b>.000</b>	<b>837.97</b> <b>0.000</b>		<b>20</b> <b>2</b> <b>Ke</b> <b>g</b>	<b>631.167.</b> <b>000,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.042.340.400 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda  (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>20.410.000,00</b>
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan  (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8.890.000,00</b>
3	Pelaporan Barang Milik Daerah  (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1.150.000,00</b>
4	Opname Fisik Aset Tetap  (1 Kegiatan)	21.115.000	21.115.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	10.870.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10.870.000,00</b>
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah  (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.945.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>22.355.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>166.673.000</b>	<b>154.900.000</b>		<b>9 Keg</b>	<b>63.675.000,00</b>

Rincian Jumlah Nilai  
Tidak ada SPj dan Tidak : - -



dilaksanakan

Tidak pernah dilaksanakan	:	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	:	-	-
Kelebihan pembayaran	:	5	3.185.000,00
Double pembayaran	:	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	-Tidak pernah dilaksanakan	21	64.512.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	6.670.000,00
	<b>Total</b>			<b>25</b>	<b>71.182.000,00</b>	
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan)	227.131.000	227.102.500	-Tidak pernah dilaksanakan	47	131.930.500,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	566.000,00
	<b>Total</b>			<b>71</b>	<b>184.647.500,00</b>	
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah (92 Kegiatan)	281.076.000	281.076.000	-Tidak pernah dilaksanakan	91	250.720.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
	<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>946.000,00</b>	



				hari perjalanan tidak sesuai waktu		00
				<b>Total</b>	92 Ke g	251.666. 000,00
4	Pelaporan Barang Milik Daerah  (0 Kegiatan)	8.979. 000	-	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	- - -	- - -
				<b>Total</b>	- Ke g	-
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah  (12 Kegiatan)	49.038. 000	48.263. 000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10 - 2	26.113.0 00,00 4.520.00 0,00
				<b>Total</b>	12 Ke g	30.633.0 00,00
6	Opname Fisik Aset Tetap  (13 Kegiatan)	47.694. 000	47.384. 000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai	10 - 3	25.937.0 00,00 4.416.00 0,00



				waktu		
					13 Ke g	30.353.0 00,00
				<b>Total</b>		
	Inventaris Barang Milik Daerah			-Tidak pernah dilaksana kan	36	102.022. 000,00
	(46 Kegiatan)	158.807 .000	158.219 .000	-Tidak ada SPJ/tidak dilaksana kan	-	-
7				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.135.0 00,00
				<b>Total</b>	46 Ke g	114.157. 000,00
	<b>Total</b>	<b>870.364 .000</b>	<b>859.128 .500</b>		25 9 Ke g	<b>682.638. 500,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00



Kelebihan pembayaran	:	49	64.359.902,00
Double pembayaran	:	1	20.177.000
<b>TOTAL</b>	:	<b>163</b>	<b>1.708.925.902,00</b>

**Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:**

<b>Rincian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai KN</b>
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>: 1706</b>	<b>4.973.146.500,00</b>

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun RKA-SKPD;

*Halaman 73 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dimana:



- Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :  
Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :  
*"Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah"*  
Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya :  
*"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*
- Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :  
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :  
*Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*  
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Halaman 75 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



*Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*

- 1) *penyusunan rencana kerja Sekretariat;*
- 2) *pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;*
- 3) *penatausahaan urusan keuangan;*
- 4) *penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;*
- 5) *pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*
- 6) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;*
- 7) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan*
- 8) *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..*

- Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan kas Daerah.*

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*

- 1) *Penyusunan rencana Kerja Bidang;*
- 2) *Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang*



*berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;*

- 3) *Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;*
- 4) *Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;*
- 5) *Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;*
- 6) *Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) uberdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa dan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring,*



*evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.*

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
- 4) penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;*
- 5) penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;*
- 6) penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;*
- 7) penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;*
- 8) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;*
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Aset, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan kegiatan Opname Fisik Aset Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, kegiatan Pengelolaan Manajemen



Barang Milik Daerah serta kegiatan Opname Fisik Aset Tetap, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.*
  - *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.*
  - *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*
- dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab:

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.*

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- 1) *penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 3) *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 4) *pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah;*
- 5) *penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan daerah;*
- 6) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*



selain bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan*
- *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan*
- *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*

(dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut dengan cara :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat

Halaman 80 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;

- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala

Halaman 81 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan



2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
    1. Subbidang Pendapatan
    2. Subbidang Belanja
    3. Subbidang Pembiayaan
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    1. Subbidang Belanja Langsung
    2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
    3. Subbidang Kas Daerah
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
    2. Subbidang Pelaporan
  - f. Bidang Aset, membawahkan :
    1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
    2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati

Halaman 86 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019

- Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Sdr. **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
  - Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.,** dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar

Halaman 87 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana	71.737.000	71.590.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Desa		
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran	55.885.000	51.153.700



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Dana Bagi Hasil dan Dana Desa		0
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000

Halaman 91 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			0
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.000

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

##### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
Total		481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
----	---------------	----------	-----------	-------------------------



1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan



2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>490.454.000</b>	<b>289.548.100</b>	<b>23 Kegiatan</b>

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>955.583.000</b>	<b>952.928.000</b>	<b>348 Kegiatan</b>



Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

### 3. Bidang Anggaran :

#### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan



	tentang Penjabaran Perubahan APBD			
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan



	Keuangan			
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>826.487.000</b>	<b>667.491.000</b>	<b>47 Kegiatan</b>

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuanga Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan



	Keuangan			
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang	8.979.000	-	



	Milik Daerah			
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;



- Selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

N o	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Keterangan
1.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	990214 764540 6	07 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314 .800,00	



2.	Leasa/Syaron Mrs	990214 764540 6	07 Jan 2020	Saum laki	Ambon		
3.	Maria/Gorett y Batlayeri Mrs (ADT)	126211 843924 0	07 Jan 2020	Ambo n	Denpa sar	Rp2.164 .800,00	GAR UDA
4.	Maria/Gorett y Batlayeri Mrs (ADT)	162211 8466264	08 Jan 2020	Denp asar	Ambo n	Rp2.214 .800,00	
5.	Batlayeri/Ma ria Goretty Mrs	990214 795796 6	09 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
6.	Lirrey/Jaco mina Mrs	990214 972816 7	24 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314 .800,00	
7.	Malirmaselle /Liberata Mrs	990214 972816 8	24 Jan 2020	Saum laki	Ambon		
8.	Malirmaselle /Liberata Mrs	990215 003086 3	27 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374 .800,00	
9.	Lirrey/Jaco mina Mrs	990215 003086 4	27 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki		
10	Batlayeri/Jo nas Mr	990214 972728 3	24 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
11	Bwariat/Fran sisco P Mr	990214 982192 5	25 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
12	Batlayeri/Jo nas Mr	990215 003824 2	27 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374 .800,00	
13	Bwariat/Fran sisco P Mr	990215 003824 3	27 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki		

Halaman 101 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



14	Bwariat/Fran sisco P Mr	990215 035607 6	29 Jan 2020	Saum laki	Jakart a	Rp6.344 .400,00	
15	Apriliano/Yo hanes Mr	990215 035607 7	29 Jan 2020	Saum laki	Jakart a		
16	Bwariat/Fran sisco P Mr	990215 061126 1	31 Jan 2020	Jakar ta (Hali m)	Sauml aki	Rp7.826 .600,00	
17	Apriliano/Yo hanes Mr	990215 061126 2	31 Jan 2020	Jakar ta (Hali m)	Sauml aki		
18	Malirmaselle /Liberata Mrs	990215 044335 8	30 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
19	Malirmaselle /Liberata Mrs	990215 044306 4	30 Jan 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
20	Batlayeri/Jo nas Mr	990215 105202 3	04 Feb 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
21	Batlayeri/Jo nas Mr	990215 136818 8	07 Feb 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
22	Jempomas e/Primus Ronald Mr	990215 180486 6	11 Feb 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
23	Jempomas e/Primus Ronald Mr	990215 200353 9	12 Feb 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
24	Lirrey/Jaco mina Mrs	990215 323152 4	24 Feb 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314 .800,00	
25	Ranolat/Han	990215	24 Feb	Saum	Ambon		



	s Mr	323152 5	2020	laki			
26	Lirrey/Jaco mina Mrs	990215 323216 5	24 Feb 2020	Ambo n	Jakart a (Halim)	Rp4.921	
27	Ranolat/Han s Mr	990215 323216 6	24 Feb 2020	Ambo n	Jakart a (Halim)	.400,00	
28	Lirrey/Jaco mina Mrs	990215 340167 9	25 Feb 2020	Jakar ta (Hali m)	Sauml aki	Rp8.196	
29	Ranolat/Han s Mr	990215 340167 9	25 Feb 2020	Jakar ta (Hali m)	Sauml aki	.200,00	
30	Titirloloby/P aulus Mr	990215 299819 7	21 Feb 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314	
31	Afis/Kurnia Mr	990215 299819 8	21 Feb 2020	Saum laki	Ambon	.800,00	
32	Titirloloby/P aulus Mr	990215 320465 7	23 Feb 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374	
33	Afis/Kurnia Mr	990215 320465 8	23 Feb 2020	Ambo n	Sauml aki	.800,00	
34	Batlayeri/Jo nas Mr	990215 322788 2	24 Feb 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
35	Batlayeri/Jo nas Mr	990215 351507 6	26 Feb 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
36	Malirmasele/ Liberata Mrs	990215 409251	02 Mar 2020	Jakar ta	Sauml aki	Rp3.913 .300,00	

Halaman 103 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



		5		(Hall m)			
37	Batlayery/M aria Goretty Mrs	990215 479085 5	09 Mar 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
38	Batlayery/M aria Goretty Mrs	990215 498491 0	10 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
39	Takndare/KI ementina Mrs	990215 498491 0	10 Mar 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
40	Takndare/KI ementina Mrs	990215 543898 4	13 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
41	Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs	990215 520775 7	12 Mar 2020	Saum laki	Ambon		
42	Fasak/Everi sta Mrs	990215 520775 8	12 Mar 2020	Saum laki	Ambon	Rp6.629 .600,00	
43	Jakobus/Jak obus Mr	990215 520775 9	12 Mar 2020	Saum laki	Ambon		
44	Kenjaplun/ Stanislaus Mr	990215 520776 0	12 Mar 2020	Saum laki	Ambon		
45	Laratmase/ Maria Moy Phin Mrs	990215 603449 5	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
46	Fasak/Everi sta Mrs	990215 603449 6	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp6.749 .600,00	
47	Jakobus/Jak obus Mr	990215 603449 7	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
48	Kenjaplun/ Stanislaus Mr	990215 520776 0	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		



	Stanislaus Mr	603449 8	2020	n	aki		
49	Fubumase/ Marsiana Mrs	990215 603518 4	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
50	Leunufna/Ita Maria Mrs	990215 603518 5	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp5.062 .200,00	
51	Sabono/Geri Simon Mr	990215 603518 6	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
52	Jamlean/Aio wysius Mr	990215 603519 6	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374 .800,00	
53	Selitubun/Pe trus P Mr	990215 603519 7	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
54	Malirmasele/ Liberata Mrs	990215 603508 9	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374 .800,00	
55	Simanjuntak /al Magdalena	990215 603509 0	20 Mar 2020	Ambo n	Sauml aki		
56	Oratmangun /Klementina Y Mrs	990214 972679 9	24 Jan 2020	Saum laki	Ambon	Rp2.157 .400,00	
57	Samangun/ Benyamin Mr	990215 679237 5	08 Apr 2020	Ambo n	Sauml aki		
58	Oratmangun /Klementina Y Mrs	990215 679237 6	08 Apr 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp8.418 .500,00	
59	Batlayeri/Ma gdalena Mrs	990215 679237 7	08 Apr 2020	Ambo n	Sauml aki		
60	Sakan/Novit	990215	08 Apr	Ambo	Sauml		

Halaman 105 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



	a Miss	6792378	2020	n	aki		
61	Samangun/ Thomas Mstr	990215 679237 9	08 Apr 2020	Ambo n	Sauml aki		
62	Sabono/Ger y Simon Mr	990216 010524 5	01 Sep 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314	
63	Jamlean/Alo wysius Mr	990216 010524 6	01 Sep 2020	Saum laki	Ambon	.800,00	
64	Jamlean/Alo wysius Mr	990216 015316 2	02 Sep 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp3.374	
65	Sabono/Geri Simon Mr	990216 015316 3	02 Sep 2020	Ambo n	Sauml aki	.800,00	
66	Bwariat/Fran sisco P Mr	990215 516853 9	11 Mar 2020	Ujung Pand ang	Sauml aki	Rp2.410 .300,00	
67	Malirmasele/ Liberata Mrs	990216 208103 9	20 Oct 2020	Saum laki	Ambon		
68	Batlayeri/Ma ria Gorety Mrs	990216 208104 0	20 Oct 2020	Saum laki	Ambon	Rp4.972 .200,00	
69	Jamlean/Alo wysius Mr	990216 208104 1	20 Oct 2020	Saum laki	Ambon		
70	Somar/Felix Ch Mr	990216 318345 5	10 Nov 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
71	Somar/Felix Ch Mr	990216 364745 0	17 Nov 2020	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
72	Mrmelmasb	990216	06 Nov	Saum	Ambon	Rp4.972	

Halaman 106 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



	essy/Imanuela Mrs	2997066	2020	laki		.200,00	
73	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saum laki	Ambon		
74	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saum laki	Ambon		
75	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76	Jempormas/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77	Melmambesy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
78	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
79	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki	Rp8.437.000,00	
80	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
81	Jempormas/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambo n	Saum laki		
82	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saum laki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
83	Titirlolobyp/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saum laki	Jakarta		
84	Larwuy/Sha	990216	11 Dec	Saum	Jakarta		



	nto Mr	515408 4	2020	laki	a		
85	Ulmasembu n/Pius Mr	990216 515408 5	11 Dec 2020	Saum laki	Jakart a		
86	Touwely/Alb yan Hart Mr	990216 515408 6	11 Dec 2020	Saum laki	Jakart a		
87	Lamere/Agn es Mrs	990216 538324 6	15 Dec 2020	Jakar ta	Sauml aki		
88	Titirloloby/P aulus Mr	990216 538324 7	15 Dec 2020	Jakar ta	Sauml aki		
89	Ulmasembu n/ Mr	990216 538324 8	15 Dec 2020	Jakar ta	Sauml aki	Rp20.75 2.000,0 0	
90	Larwuy/Shan to Mr	990216 538324 9	15 Dec 2020	Jakar ta	Sauml aki		
91	Touwely/Alb yan Hart Mr	990216 538325 0	15 Dec 2020	Jakar ta	Sauml aki		
92	Lololuan/Im anuel Mr	990216 612179 6	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
93	Boinsera/Pe trus B Mr	990216 609553 3	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
94	Ngilamele/W elem Mr	990216 609553 4	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp6.629 .600,00	
95	Kuway/Cord a Natalia Mrs	990216 609553 5	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
96	Lartutul/Yoh	990216	28 Dec	Saum	Ambon		



	ana Mrs	609553 6	2020	laki			
97	Lamere/Zak arias Mr	990216 609554 6	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
98	Malaka/Vickt or Mr	990216 609554 7	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp6.629	
99	Jempormas e/Ronald J Mr	990216 609554 8	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon	.600,00	
10	Titirloloby/M arthin M R Mr	990216 609554 9	28 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
10	Maranresy/V iktorianus Mr	990216 614301 9	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp3.314	
10	Touwely/Alb yan Hart Mr	990216 614302 0	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon	.800,00	
10	Taborat/Jos eph Isidorus Mr	990216 614267 4	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp1.657 .400,00	
10	Bwariat/Fran sisco P Mr	990216 614213 7	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
10	Sumanik/Ani ta Theresia Mrs	990216 614213 8	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon	Rp8.287	
10	Apriliano/Yo hanis Mr	990216 614213 9	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon	.000,00	
10	Sermatang/ Kristina Mrs	990216 614214 0	29 Dec 2020	Saum laki	Ambon		
10	Melmambes	990216	29 Dec	Saum	Ambon		



	sy/Imanuela Mr Mrs	614214 1	2020	laki			
10	Kuway Corda Natalia Mrs	990216 628712 3	01 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Melmambes sy/Imanuela Mr Mrs	990216 628712 4	01 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki	Rp5.062 .200,00	
11	Jempormas e/Maria Cicilia Miss	990216 628712 5	01 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Titirloloby/M arthin M R Mr	990216 644404 1	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Apriliano/Yo hanis Mr	990216 644404 2	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki	Rp6.749 .600,00	
11	Ngilamele/W elem Mr	990216 644404 3	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Boinsera/Pe trus B Mr	990216 644404 4	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Bwariat/Fran sisco P Mr	990216 644506 7	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Maranresy/V iktorianus Mr	990216 644506 8	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki	Rp8.437 .000,00	
11	Jempormas e/Ronald J Mr	990216 644506 9	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
11	Sermatang/ Kristina Mrs	990216 644507 0	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki		
12	Sumanik/Ani	990216	04 Jan	Ambo	Sauml		



	ta Theresia Mrs	644507 1	2021	n	aki		
12	Touwely/Alb yan Hart Mr	990216 644621 0	04 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
12	Taborat/Jos eph Isodorus Mr	990216 645286 2	05 Jan 2021	Ambo n	Sauml aki	Rp1.687 .400,00	
<b>Jumlah</b>						<b>Rp243.175.800,</b> <b>00</b>	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402**

Halaman 111 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



(enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)

- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
  2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;
- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan

Halaman 112 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**
  - Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu**

Halaman 113 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
  - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
  - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfirmasi (meninggal dunia)
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) diantaranya :
- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
  - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)
- Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan

Halaman 114 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
  - d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
  - e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
  - f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 115 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.
  - Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas

Halaman 116 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu :

**1. Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Reli sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Battlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk

*Halaman 117 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan "jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.**

Halaman 118 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi

Halaman 119 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat, antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-



masing tidak lebih dari Rp1.000.000
-------------------------------------

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutludur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

Halaman 121 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



#### 5. Bidang Anggaran antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Halaman 122 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 141 :  
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
  3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :  
angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*  
angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan ***tujuan memperkaya diri Terdakwa*** lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 123 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta *memperkaya orang lain* dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu



rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
<b>TOTAL</b>		<b>8.656.744.600</b>	<b>6.682.072.402</b>

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

N o	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat	397.170.000	397.170.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00



	koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan)			- Kelebihan Pembayaran Tiket - Tidak sesuai peruntukan - Tidak pernah dilaksanakan	8 1 5	11.818.902,00 24.530.000 56.348.200,00
				<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>301.383.302,00</b>
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>42.438.000,00</b>
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan Pembayaran Tiket	1 1	22.974.000,00 3.379.500,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>26.353.500,00</b>
	<b>Total</b>	<b>481.074.000</b>	<b>480.748.000</b>		<b>30 Ke g</b>	<b>370.174.802,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 12	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 9	15.198.402,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordina	758.071.000	758.071.000	-Tidak pernah dilaksanakan	15 8	536.615.000,00



	si dan Konsultasi Dalam Daerah  (194 Kegiatan)			-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2 5  1 1	99.524. 000,00  10.718. 000,00
				<b>Total</b>	<b>19 4 Ke g</b>	<b>646.857. 000,00</b>
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS  (82 Kegiatan)	275.289. .000	275.289. .000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6 7  1 2  3	208.889. 000,00  34.889.0 00,00  2.290.00 0,00
				<b>Total</b>	<b>82 Ke g</b>	<b>246.068. 000,00</b>
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan  (35 Kegiatan)	47.974. 000	47.974. 000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2 2  1   1 2	25.724. 000,00  2.425.0 00,00  5.824.0 00,00
				<b>Total</b>	<b>3 5 Ke g</b>	<b>33.973. 000,00</b>
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial  (45 Kegiatan)	262.921. .000	262.921. .000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari	3 6  7   2	121.062. 000,00  23.151.0 00,00  1.372.00



	)			perjalanan tidak sesuai waktu		0,00
					45	Ke
				<b>Total</b>		<b>145.585.000,00</b>
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah (122 Kegiatan)	414.598.000	414.598.000	-Tidak pernah dilaksanakan	94	278.295.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	26.722.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00
				<b>Total</b>	122	<b>324.395.000,00</b>
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan)	295.838.000	295.838.000	-Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
				<b>Total</b>	93	<b>255.916.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>2.054.691.000</b>	<b>2.054.691.000</b>		571	<b>1.652.794.000,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak	: 61	52.035.000,00



sesuai waktu

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa  (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	2	19.604.800,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.081.800,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>40.686.600,00</b>
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik  (6 Kegiatan)	116.558.000	111.260.400	- Tidak pernah dilaksanakan	2	28.569.000,00
				- Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian)	1	20.177.000
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	8.949.000,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>57.695.000,00</b>				
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen  (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8.800.000,00</b>
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	- Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan	5	62.049.000,00



	(6 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	1	3.803.500,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>65.852.500,00</b>
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
	(4 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>490.454.000</b>	<b>289.548.100</b>		<b>21 Keg</b>	<b>209.529.100,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	-Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	3.360.000,00
				<b>Total</b>	<b>28 Keg</b>	<b>66.840.000,00</b>
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (34 Kegiatan)	36.744.000	36.666.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00
				<b>Total</b>	<b>34 Keg</b>	<b>30.791.000,00</b>



					4	00,00
					Ke	
					g	
3	Penataan Administrasi Gaji (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3 7 2 9 1 0	104.085.000,00 98.124.000,00 12.600.000,00
					7 6 Ke	214.809.000,00
				Total	g	
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5 5 - 1 3	168.067.000,00 - 18.799.000,00
					6 8 Ke	186.866.000,00
				Total	g	
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan)	96.113.000	95.410.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2 4 5 5	65.573.000,00 9.963.000,00 5.223.000,00
					3 4 Ke	80.759.000,00
				Total	g	
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaann) (86 Kegiatan)	294.777.000	294.514.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4 0 3 9 7	127.296.000,00 128.648.000,00 8.335.000,00
					8 6 Ke	264.279.000,00
				Total	g	



Total	955.583 .000	952.928 .000	32 6 Ke g	844.344. 000,00
-------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :
  - a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (6 Kegiatan)	116.722 .000	115.479 .000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119. 000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	34.460. 000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	7.581.4 00,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>99.160. 400,00</b>
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (9 Kegiatan)	127.169 .000	125.039 .000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	1	10.245. 000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	104.549. 000,00
				<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>114.794. 000,00</b>
3	Asistensi dan	143.699 .000	143.699 .000	- tidak ada SPj / tidk	3	67.469.0 00,00



	Verifikasi Rancangan DPA-SKPD (7 Kegiatan)			dilaksankn - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1 3	20.730.000,00 10.478.500,00
				<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>98.677.500,00</b>
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD (4 Kegiatan)	40.340.000	40.340.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	3 1	30.095.000,00 272.300,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>30.367.300,00</b>
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (10 Kegiatan)	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn - Tidak pernah dilaksanakan	3 7	65.322.000,00 91.020.000,00
				<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>156.342.000,00</b>
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota (16 Kegiatan)	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn - Kelebihan pembayaran tiket	5 1 1	85.259.000,00 5.387.400,00
				<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>90.646.400,00</b>
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1 1 5	7.169.000,00 8.470.000,00 5.043.000,00



	Perubahan APBD				
	(7 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>7</b>
					<b>20.682.000,00</b>
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2
	(2 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>2</b>
					<b>43.704.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>930.662.000</b>	<b>903.370.000</b>		<b>61</b>
				<b>Ke</b>	<b>654.373.600,00</b>
				<b>g</b>	

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 21	28.762.600,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10	365.252.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	3	000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	1.737.000,00
					11	15.707.000,00
	<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>382.696.000,00</b>	
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	-Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>98.332.000,00</b>



	)				Ke g	00,00
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	-Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
	Total				79 Ke g	267.466.000,00
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	-Tidak pernah dilaksanakan	107	393.368.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
	Total				119 Ke g	413.709.000,00
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000		348 Ke g	1.162.203.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

#### 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :



a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan)	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	5	52.195.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>55.139.000,00</b>
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	13	147.618.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>169.123.000,00</b>				
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>18.430.000,00</b>
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>40.820.000,00</b>
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
				- Kelebihan	3	1.127.400,00



	)			pembayaran tiket		00,00
				<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>127.661.400,00</b>
	<b>Total</b>	<b>826.487.000</b>	<b>667.491.000</b>		<b>42 Keg</b>	<b>411.173.400,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 10	4.461.400,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	-Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000.000,00
	<b>Total</b>			<b>38 Keg</b>	<b>120.339.000,00</b>	
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17	114.731.000	114.721.000	-Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
	<b>Total</b>			<b>17 Keg</b>	<b>57.397.000,00</b>	





Tidak pernah dilaksanakan : 186 613.596.000,00  
 Jumlah hari perjalanan tidak : 16 17.571.000,00  
 sesuai waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda  (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				Total	1	20.410.000,00
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan  (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				Total	2	8.890.000,00
3	Pelaporan Barang Milik Daerah  (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
				Total	1	1.150.000,00



n)					
4	Opname Fisik Aset Tetap (1 Kegiatan)	21.115.000	21.115.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1 10.870.000,00
				Total	1 10.870.000,00
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1 3 20.410.000,00 1.945.000,00
				Total	4 22.355.000,00
	Total	166.673.000	154.900.000		9 Ke g 63.675.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahan (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2 1 - 4	64.512.000,00 6.670.000,00
				Total	25 Ke g	71.182.000,00
2	Penyediaa	227.13	227.10	-Tidak	4	131.930,



	n Sertifikasi Tanah Pemda  (71 Kegiatan)	1.000	2.500	pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	7 2 3 1	500,00 52.151.0 00,00 566.000, 00
					71 Ke g	184.647. 500,00
3	Pengelola an Manajeme n Barang Milik Daerah  (92 Kegiatan)	281.07 6.000	281.07 6.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	9 1 -	250.720. 000,00 -
					9 2 Ke g	251.666. 000,00
4	Pelaporan Barang Milik Daerah  (0 Kegiatan)	8.979. 000	-	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	- -	- -
					- Ke g	-
5	Penyusun an Rancanga n Peraturan Bupati tentang	49.038 .000	48.263 .000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1 0 -	26.113.0 00,00 -

Halaman 141 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



	Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan)			an -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	4.520.000,00
					12 Ke g	30.633.000,00
6	Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan)	47.694.000	47.384.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1 0 3	25.937.000,00 - 4.416.000,00
					1 3 Ke g	30.353.000,00
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan)	158.807.000	158.219.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3 6 1 0	102.022.000,00 - 12.135.000,00
					4 6 Ke g	114.157.000,00
	<b>Total</b>	<b>870.364.000</b>	<b>859.128.500</b>		2 59 Ke g	<b>682.638.500,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 215	601.234.500,00



Jumlah hari perjalanan tidak : 21  
sesuai waktu 29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000,00
TOTAL	: 163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
TOTAL	: 1706	4.973.146.500,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 143 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dan apabila

Halaman 144 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.230.869.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kis I A dengan Nomor Rekening : 00024-01-30-000181-9, dan uang sejumlah **Rp.322.500.000 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** selanjutnya telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti, terhadap sisa uang pengganti sejumlah **Rp.708.369.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)** apabila **Terdakwa** tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  7. Menyatakan Barang bukti :
    - 1) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
    - 2) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
    - 3) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
    - 4) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;



- 5) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 9) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 11) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
- 12) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
- 13) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
- 14) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
- 15) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
- 16) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);

Halaman 146 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 17) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
- 18) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
- 19) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
- 20) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
- 21) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
- 22) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
- 23) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malimaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
- 24) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
- 25) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
- 26) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
- 27) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
- 28) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);

Halaman 147 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 29) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
- 30) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titiriloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
- 31) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
- 32) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titiriloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
- 33) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
- 34) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
- 35) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
- 36) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
- 37) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
- 38) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
- 39) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
- 40) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);

Halaman 148 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 41) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
- 42) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
- 43) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun /Stanislaus Mr (9902155207760);
- 44) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
- 45) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902156034498);
- 46) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
- 47) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
- 48) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
- 49) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);

Halaman 149 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 50) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
- 51) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
- 52) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Battlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);
- 53) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
- 54) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
- 55) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
- 56) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
- 57) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
- 58) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
- 59) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);



- 60) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
- 61) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titiriloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
- 62) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titiriloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
- 63) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902165424585);
- 64) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);
- 65) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Imanuel Mr (9902166121796);
- 66) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
- 67) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase/Ronald J Mr (9902166095548) dan Titiriloby / Marthin M R Mr (9902166095549);
- 68) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
- 69) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy /

Halaman 151 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
- 70) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isidorus Mr (9902166142674);
- 71) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang/Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
- 72) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);
- 73) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
- 74) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
- 75) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
- 76) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isidorus Mr (9902166452862);
- 77) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).



- 78) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
- 79) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
- 80) Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
- 85) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara

Halaman 153 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- 86) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
  - 87) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
  - 88) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
  - 89) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
  - 90) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
  - 91) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
  - 92) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
  - 93) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
  - 94) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;

Halaman 154 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 95) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- 96) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
- 97) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyapluan,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA

Halaman 155 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 103) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 105) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 156 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 111) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 112) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
- 113) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 114) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;

- 116) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
- 117) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran.

**Terlampir Dalam Berkas Perkara**

- 118) 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
- 119) 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
- 120) 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 121) 1 (satu) bidang tanah luas 484 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 122) 1 (satu) bidang tanah luas 475 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 123) 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 124) 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku

Halaman 158 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- 125) 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
- 126) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
- 127) BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
- 128) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILELANG DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**
- 129) Uang Tunai sejumlah Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
- DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**
- 130) Uang Tunai sejumlah Rp352.300.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA, DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
8. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp.522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah ), pengembalian Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = **Rp 5.300.972.402** (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan

Halaman 160 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
  3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;



11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria /Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);

Halaman 162 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey / Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);

Halaman 163 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey /Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496),

Halaman 164 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Jakobus /Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
  47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
  48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak / Friska Magdalena (9902156035090);
  49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun / Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun / Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri / Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
  50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
  51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean /Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
  52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele / Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri / Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean / Alowysius Mr (9902162081041);
  53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
  54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902162595413);
  55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy

Halaman 165 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano / Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Imanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy /Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano / Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy / Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby / Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby / Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun / Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);



65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere / Zakarias Mr (9902166095546), Malaka / Viktor Mr (9902166095547), Jempomase / Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby /Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy / Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik / Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano / Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang / Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempomase / Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042),

Halaman 167 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempomase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
  75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
  76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
  77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
  78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
  79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
  80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017;
  81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
  82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.

83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malimasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malimasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;

Halaman 169 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 170 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat

Halaman 171 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



- Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
  108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
  109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
  110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
  111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
  112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
  113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun

Halaman 172 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017

114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jaflaun (anggota DPRD);
119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);
120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;  
**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE;**
121. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih

Halaman 173 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



122. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
123. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
126. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
127. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
128. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
129. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969;
130. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
131. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860;



Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;

132. Uang Tunai sejumlah Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pengembalian dari Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4.a/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Maret 2024

Halaman 175 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara atas nama terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon khususnya tentang Penjatuhan Pidana pokok, Uang Pengganti dan Denda yang dijatuhkan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam hal perhitungan dan penetapan Kerugian Keuangan Negara;



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut Jaksa Penuntut Umum keliru atau salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan dan sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penjatuhan Pidana pokok, Uang Pengganti dan Denda yang dijatuhkan serta telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam hal perhitungan dan penetapan Kerugian Keuangan Negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan, serta sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari Terdakwa, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai rentang penjatuhan pidana sebagaimana Pasal



12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihubungkan dengan kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa aspek keuntungan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori sedang** karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori tinggi** karena Terdakwa merupakan orang yang memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dimana terdapat perjalanan fiktif serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, serta orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, sehingga akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 178 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan merupakan dampak dalam kategori rendah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka rentang penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** dengan menyesuaikan kategori kerugian keuangan negara Tingkat Sedang, yaitu lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan tingkat kesalahan dalam kategori tinggi, dampak dalam kategori rendah dan keuntungan dalam kategori sedang, maka sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dengan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** dan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** adalah dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, yang telah memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah

Halaman 179 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



ditetapkan dalam DPA dan DPPA, serta mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut. Dan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif).

Menimbang bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, telah memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam

Halaman 180 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang bahwa atas kerugian negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** adalah merupakan perbuatan dari Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** sehingga terhadap Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.** dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, akan dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp. 522.500.000,- (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)** pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dan pengembalian dari saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, sebesar **Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E.**, sebesar **Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah )** Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, sebesar **Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)** dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)**, sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan total pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = Rp 5.300.972.402 (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan ketentuan

Halaman 181 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ini bukan menderitakan atau merendahkan martabat Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, akan tetapi lebih mengutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah adil dan patut apabila Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dijatuhi pidana seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang pantas dan adil terhadap perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tersebut sebagaimana pada amar putusan dibawah ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah sekedar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat



(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024 atas nama Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS.**, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua**

Halaman 183 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



ribu empat ratus dua rupiah) yang dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp.522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00** (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp6.682.072.402** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar **Rp.1.381.100.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = **Rp 5.300.972.402** (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
  3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Battlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);

Halaman 185 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/IPT AMB



12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria /Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);

Halaman 186 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey / Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);

Halaman 187 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey /Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlavery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlavery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun/Stansilaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);



45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laralmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus /Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak / Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun / Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun / Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri / Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean /Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele / Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri / Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean / Alowysius Mr (9902162081041);
53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);

Halaman 189 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/IPT AMB



54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano / Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Imanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy /Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano / Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy / Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby / Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby / Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun / Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);

Halaman 190 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere / Zakarias Mr (9902166095546), Malaka / Vicktor Mr (9902166095547), Jempomase / Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby /Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy / Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik / Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano / Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang / Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166142141);

Halaman 191 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempomase / Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titiriloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/ Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempomase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titiriloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan

Halaman 192 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;

Halaman 193 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.

Halaman 194 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 195 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 196 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;

Halaman 197 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jaflaun (anggota DPRD);
119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);
120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;  
**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE;**
121. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
122. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
123. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku

Halaman 198 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB



126. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
  127. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
  128. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
  129. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969;
  130. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
  131. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860;  
**Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;**
  132. Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Pengembalian dari Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;  
**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;**
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh SYAMSUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H., dan



GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LORENS FENINLAMBIR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H

Ttd,

GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn

HAKIM KETUA,

Ttd,

SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H

Halaman 200 dari 200 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)